

usaha. Melanggar etika usaha berarti melanggar prinsip-prinsip bisnis beretika dan berkelanjutan yang berisi kewajiban-kewajiban bagi badan usaha. Prinsip-prinsip bisnis beretika dan berkelanjutan terdiri dari prinsip ketaatan hukum, prinsip keterbukaan dan transparansi, prinsip tanggung gugat atau akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban atau *responsibility*, prinsip kewajaran atau *fairness*, prinsip kejujuran atau *honesty*, prinsip empati, prinsip kemandirian, prinsip konsistensi. Lembaga Ombudsman DIY juga tidak memisahkan antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran etika. Hal itu berarti melanggar etika juga berarti melanggar hukum.

B. Saran

1. Daerah lain di Indonesia dapat mencontoh Provinsi DIY dengan membuat Lembaga Ombudsman yang bisa mengawasi pelayanan publik yang dilakukan sektor swasta. Pembentukan lembaga pengawas seperti Lembaga Ombudsman DIY, selain meningkatkan kualitas pelayanan publik juga meningkatkan akses keadilan konsumen dan mendorong penyelenggaraan usaha yang baik dan beretika.
2. Konsumen dapat memanfaatkan skema ombudsman seperti Lembaga Ombudsman DIY untuk mendapatkan keadilan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha bisa melaporkan terjadinya penyimpangan etika usaha kepada Lembaga Ombudsman DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bertens, Kees. (2013). *Etika*. Yogyakarta. Penerbit PT Kanisius.
- Bertens, Kees. (2016). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta. Penerbit PT Kanisius.
- Budiono, Gatut L. (2011). *Etika Bisnis Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta. Penerbit Poliyama Widya Pustaka.
- Dewantara, Agustinus W. (2017). *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta. Penerbit PT kanisius.
- Efendi, Jonaedi., Johnny Ibrahim. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Garner, Bryan A. (2009). *Black Law Dictionary*. United States of America. West Publishing Co.
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya. Bayumedia Publishing.
- Keraf, Sonny. (1998). *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*. Yogyakarta. Penerbit PT Kanisius.
- Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). *Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Ketiga (Juli-September 2017)*. Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). *Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Pertama (Januari-Maret 2019)*. Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan Keempat (Oktober-Desember 2021)*. Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2016). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.

- Nugroho, Arissetyanto., Agus Arijanto. (2015). *Etika Bisnis (Business Ethics) Pemahaman Teori Secara Komprehensif dan Implementasinya*. Bogor. Penerbit IPB Press.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2020). *Indeks Persepsi Maladministrasi 2019*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Patarai, M. Idris. (2015). *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. Makassar. Penerbit De La Macca.
- Prihatiningtyas, Budi. (2019). *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*. Malang. Penerbit CV IRDH.
- Priyono, Dwi., Setiarini, Yustina., Firdausie, Nukman., Nursanto, Slamet., Akhiroh, S.U., Purnama, Nursya'bani., Aryani, Hanum., Kurniawan, M.P., & Sasmita, M.B. (2013). *Pedoman Tata Kelola Usaha Beretika*. Yogyakarta. Lembaga Ombudsman Swasta DIY.
- Roestandi, Achmad. (2012). *Etika Dan Kesadaran Hukum Internalisasi dan Eksternalisasi Etika*. Tangerang. Penerbit Jelajah Nusa.
- Siburian, Kasman., Victorianus, R. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Soekanto, Soerjono., Sulistyowati, Budi. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Wibowo, A. Setyo. (2010). *Arete Hidup Sukses Menurut Platon*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

Tesis:

- Arie Gunarti, 2014, *Peran Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta (LOD DIY) Terhadap Pengawasan Pelayanan Publik (Studi Terhadap Pelayanan BLSM Di Yogyakarta)*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Dahlana, 2016, *Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Dhenok Panuntun Trisuci Asmawati, 2015, *Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Jurnal:

- Anastasyah, Dinda., Hidayat, Hajan. (2017). Perbedaan Persepsi Tentang Etika Bisnis Pada Mahasiswa Yang Belum dan Sudah Mempelajari Mata Kuliah Etika Bisnis Pada Prodi Akuntansi Di Perguruan Tinggi Kota Batam. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5 (2), 204-212.
- Butarbutar, Bosman. (2019). Peranan Etika Bisnis Dalam Bisnis. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1 (2), 187-195.
- Lantaeda, S.B., Lengkong, F.D.J., & Ruru, J.M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (48), 1-9.
- Manik, D.E.M. (2018). Pengaruh Citra Perusahaan Dan Relationship Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen PT. Astra Internasional-Medan. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis (JRMB)*, 3 (2), 8-13.
- Murwadji, Tarsisius. (2016). Etika Bisnis Sebagai Dasar “Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan” Perbankan. *Jurnal Hukum POSITUM*, 1 (1), 1-22.
- Pratiwi, T.C.R., & Widiyastuti, Tetty. (2018). Analisis Citra Perusahaan Terhadap Keputusan Pembelian Motor Merek Yamaha Di CV Alvina Indah Motor Blitar. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 3 (2), 161-169.
- Widijantoro, Johanes. (2016). Mewujudkan Perniagaan Berkeadilan Melalui Peningkatan Akses Keadilan Konsumen. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28 (3), 440-452.

Internet:

- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Asas* (Def. 3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 19 November 2021, melalui <https://kbbi.web.id/asas>.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Peran* (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 7 Februari 2022, melalui <https://kbbi.web.id/peran>.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Prinsip*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 19 November 2021, melalui <https://kbbi.web.id/prinsip>.
- Lembaga Ombudsman DIY, (tanpa tahun), Sejarah LOD DIY, “diambil dari <https://ombudsman.jogjaprovo.go.id/sejarah-lod-diy/>”.

Lembaga Ombudsman DIY, (tanpa tahun), Sejarah LOS DIY, “diambil dari <https://ombudsman.jogjaprov.go.id/sejarah-los-diy/>”.

Lembaga Ombudsman DIY, 28 Februari 2022, Detail Data Konsultasi, “diambil dari <https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan/>”.

Lembaga Ombudsman DIY, Detail Data Aduan/Laporan, 28 Februari 2022, “diambil dari <https://ombudsman.jogjaprov.go.id/laporan/>”.

Utomo, Warsito, (tanpa tahun), Filosofi dan sejarah Ombudsman, “diambil dari [#### **Peraturan Perundang-Undangan:**](https://ombudsman.jogjaprov.go.id/filosofi-dan-sejarah-ombudsman/#:~:text=Sejarah%20kelahiran%20lembaga%20Ombudsman%20bermula,1919%20dibentuk%20ombudsman%20di%20Finlandia.&text=Barulah%20kemudian%20berkembang%20ke%20Amerika,Amerika%20sendiri%20dimunculkan%20di%20Hawaii.””.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 69. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 28. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1172. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.

Putusan Pengadilan:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, Putusan No. 62/PUU-VIII/2010.

